

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendidikan

Secara garis besar proses pendidikan dibentuk secara sistematis guna menciptakan suasana belajar dan mengajar yang aktif bagi siswa maupun siswi dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menciptakan nilai ketakwaan, kontrol diri, karakter, tingkat intelektual, akhlak, serta keterampilan yang akan menunjang dirinya di kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 yang membahas mengenai definisi dan urgensi dalam pendidikan menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk nyata dalam proses pembangunan nasional. Pendidikan ialah dasar atau pondasi bangsa dalam menentukan arah perkembangan bangsa.

Kemudian jika ditarik dari sejarah pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan secara luas yaitu sumber daya utama dalam peningkatan budi pekerti tiap individu. Menurut Mudyahardjo (Prawijaya, 2015) Pendidikan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terstruktur yang didalamnya terdapat suatu kelompok yang memiliki output hubungan timbal balik dan didalamnya mengandung informasi. Ahmad D Marimba juga merumuskan pendidikan sebagai didikan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik yang tujuannya untuk membentuk perkembangan bagi anak, baik itu secara jasmani maupun rohani. Tujuan dari pendidikan disini adalah sebagai sarana pengembangan potensi atau minat peserta didik agar membentuk karakter yang beriman, bertakwa, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.

Langeveld juga menafsirkan pendidikan sebagai suatu usaha, serta pengaruh nyata yang diberikan pada anak atau peserta didik dengan tujuan untuk memberikan bekal menuju pendewasaan diri. Pengaruh tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan sekolah secara formal di kelas melainkan pengalaman serta dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Jika ditarik secara historis, konsep pendidikan sudah lahir Ketika manusia tercipta di muka bumi. Pendidikan sudah ada ketika orang tua mengajarkan anaknya atau juga sebaliknya anak belajar kepada orang tuanya atau seseorang yang dinilai lebih dewasa dilingkungan sekitarnya.

Disamping teori mengenai pendidikan, (Notoatmodjo, 2003) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat erat terhadap proses kognitif seseorang dalam meningkatkan pengetahuan. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi seberapa tinggi penguasaan materi seseorang, sehingga dengan seseorang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi maka pengetahuan, wawasan serta informasi yang didapat akan semakin banyak dan juga semakin berkualitas. Sumber informasi yang didapat juga menjadi salah satu indikator penting dalam mendapatkan informasi. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin selektif pula sumber-sumber informasi yang dijadikan rujukan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan.

2.1.1 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan KBBI, tingkat diartikan sebagai tumpuan pada tangga, tinggi rendahnya martabat (jabatan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya). Maka kemudian dapat disimpulkan bahwa tingkat merupakan ukuran, yang mana dalam penelitian ini tingkat adalah sebagai jenjang atau tahapan. Tingkat pendidikan

diartikan sebagai proses atau tahapan pendidikan yang diselesaikan peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas diri. Dengan penyelesaian tingkatan pendidikan yang tinggi maka akan mempengaruhi proses penerimaan informasi yang kemudian dapat dianalisis terlebih dahulu sebelum diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Komaruddin (Astuti et al., 2018) tingkat pendidikan memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan taraf kehidupan manusia serta secara lebih luas dapat berpengaruh terhadap income nasional, dimana dengan adanya kegiatan belajar mengajar, masyarakat akan terbuka dengan gagasan dan harapan baru yang nantinya diharapkan untuk memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Tingkat pendidikan juga diartikan sebagai tahapan pendidikan secara resmi oleh lembaga yang berwenang yang diatur berdasarkan pada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan, serta metode pengajaran yang tepat.

2.1.2 Indikator Tingkat Pendidikan

Menurut Lestari (Astuti et al., 2018) indikator dalam tingkat pendidikan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal yaitu suatu arah pendidikan yang dibentuk secara sistematis dengan didalamnya memiliki jenjang dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan ini dilaksanakan di sekolah atau Lembaga pendidikan yang bersifat akademis. Konsep pendidikan formal dibuat agar pendidik menjadi sebuah objek yang “serba tahu” yang mana sering muncul dengan istilah *the teacher can do no*

wrong. Dalam pendidikan formal, indikator yang dilihat adalah pendidikan terakhir yang diselesaikan oleh setiap individu, baik itu SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

b. Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang menjadikan keluarga dan lingkungan sebagai sarana dan prasarana yang bertanggung jawab atas kegiatan belajar anak secara mandiri. Pendidikan informal diperoleh seseorang dikehidupan sehari-hari baik itu secara sadar maupun tidak sadar, sejak dia lahir hingga meninggal dunia. Pada pendidikan informal, indikator yang dapat dilihat dari peserta didik tersebut adalah karakter dan kepribadian yang dibangun dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

2.1.3 Tingkat Pendidikan Sekolah di Indonesia

1. Pendidikan Dasar

Konsep pendidikan dasar yakni memberikan pengetahuan dan penumbuhan sikap dasar pada peserta didik yang nantinya berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Secara prinsip pendidikan dasar memberikan pondasi yang kuat dalam perkembangan kehidupan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud dapat berupa pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah dengan tingkat pendidikan dasar yaitu sekolah dasar.

2. Pendidikan Menengah

Konsep pendidikan menengah menekankan pada peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar baik itu secara sosial, budaya, serta alam sekitar. Pendidikan menengah juga dapat mengembangkan potensi lebih komprehensif dalam menunjang dunia kerja ataupun pendidikan tinggi. Dalam pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum disini dilaksanakan guna mempersiapkan peserta didik menuju pendidikan tinggi, dan juga memberikan bekal dalam memasuki dunia kerja. Pendidikan menengah kejuruan dilaksanakan guna menciptakan peserta didik menuju jenjang ke profesian lebih lanjut baik itu dalam dunia kerja maupun dalam pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan pada pendidikan menengah adalah SMP, SMA, dan SMK.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi disini merupakan tingkatan pendidikan yang dipersiapkan agar peserta didik dapat menjadi sub anggota masyarakat yang memiliki tingkat intelektual lebih tinggi sehingga nantinya diharapkan dapat diimplementasikan dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Jenjang pendidikan tinggi diantaranya strata 1, strata 2, dan strata 3.

2.1.4 Perbedaan Tingkat Pendidikan

Setiap individu memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendidikan seseorang diantaranya:

1. Motivasi Individu

Menurut (Suryabrata, 2006) Motivasi sendiri merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri setiap individu yang secara langsung mendorongnya untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai tujuannya. Motivasi belajar dan prestasi tentunya akan sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Semakin tinggi motivasi seseorang untuk mendapatkan prestasi, maka akan semakin tinggi pula keinginan seseorang untuk belajar dan mendapatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun beberapa bentuk motivasi dalam mendapatkan pendidikan seseorang dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya:

a. Kemauan untuk mendapatkan pendidikan

Pada dasarnya keinginan merupakan aspek dasar seseorang untuk mau berjuang dalam hal mendapatkan pendidikan. Adanya keinginan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik itu orang tua maupun lingkungan sekitar akan memberikan kenyamanan tersendiri anak tersebut untuk menjalani proses pendidikannya. Pada hakikatnya setiap individu memiliki kemauan dalam mendapatkan kompetensi dan pengakuan dari lingkungannya,

sehingga nantinya akan menimbulkan rasa kepercayaan diri seseorang tersebut dalam mencapai ekspektasinya.

b. Cita-cita atau tujuan

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi motivasi serta tujuan seseorang dalam menyelesaikan jenjang pendidikannya yakni cita-cita yang ada dalam diri individu tersebut. Cita-cita yang ada dalam diri setiap individu akan memberikan gambaran terkait proses yang harus ditempuh agar bisa mencapai cita-citanya tersebut.

2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial disini merupakan kondisi kemasyarakatan yang seringkali mengalami perubahan berdasarkan proses sosial yang terjadi. Proses sosial ini kemudian hadir karena adanya interaksi sosial didalamnya. Interaksi sosial tersebut kemudian dapat membentuk norma-norma tertentu dalam kelompok masyarakat

3. Kondisi Ekonomi Keluarga

Tingkat ekonomi keluarga juga menjadikan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang dalam mengenyam pendidikan. Menurut Triwiyanto (WF & Lesmana, 2017) terjaminnya pendidikan bagi seseorang akan bergantung pada seberapa tinggi kemampuan ekonomi orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan pendidikan anak salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Teori tersebut kemudian dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan mengenai ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi.

4. Motivasi Orang Tua

Motivasi yang diberikan orang tua kepada anak nyadalah mendorong pendidikannya sangat berpengaruh terhadap motivasi diri seseorang. Orang tua disini juga sebagai pendidik yang menjadi faktor utama dalam mendorong karakter anaknya. Motivasi yang diberikan juga dapat berupa moril maupun materil.

5. Akses

Akses pendidikan juga sangat penting dalam menunjang seseorang dalam mendapatkan pendidikan. Jarak dari rumah ke sekolah serta akses transportasi yang memadai akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

2.2 Pengertian Politik

Sebagaimana yang disampaikan oleh (Kartono, 1996) dalam karyanya yang berjudul “Pendidikan Politik” menegaskan bahwa politik merupakan bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi aturan dan kebijakan publik yang berlaku dengan menggunakan kekuasaan sebagai senjata dengan tujuan kemaslahatan untuk masyarakat umum. Secara lebih singkat, politik diartikan sebagai segala hal yang dilakukan dalam mendapatkan kekuasaan. Secara sederhananya politik merupakan cara atau langkah setiap individu untuk dapat mempengaruhi kehidupan kelompok melalui pengambilan keputusan.

Kemudian menurut salah satu filsuf yakni Aristoteles dengan teori klasiknya, bahwa politik merupakan suatu proses oleh individu tau kelompok yang dilakukan dengan tujuan kebaikan bersama.

2.2.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah suatu proses yang dilakukan masyarakat dalam menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan proses partisipasi dalam politik ini masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses perumusan kebijakan, hal tersebut akan meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh para aktor pemangku kebijakan. Menurut Huntington dan Nelson (A. Zaini Bisri, 2012) mendeskripsikan partisipasi politik kedalam bentuk serangkaian aktivitas setiap warga negara dalam berperilaku sebagai individu yang didalamnya terdapat maksud dan tujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang diinisiasi oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini partisipasi politik dapat dilakukan secara pribadi atau berkelompok, terstruktur ataupun spontan, dilakukan secara damai atau juga secara kekerasan, secara legal ataupun illegal, dan dilakukan secara efektif ataupun sebaliknya.

Menurut McClosky (Budiardjo, 2008) pengertian partisipasi politik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga negara atau masyarakat secara sukarela menjadi bagian dari proses pemilihan umum, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk partisipasi publik, serta perumusan kebijakan. Selain itu, menurut Adams (Miaz, 2012) politik memiliki peran penting dalam pengembangan diri dan kemandirian setiap warga negara, dengan partisipasi setiap individu memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang nantinya memiliki kesadaran dalam membedakan pribadi minat. dengan kepentingan bersama.

Definisi partisipasi politik kemudian disampaikan oleh Khamisi (Nurhidayah, 2012) yaitu suatu keinginan bersifat individu untuk ikut andil dalam dunia politik baik itu secara turun langsung mempengaruhi aturan administratif, ikut aktif dalam berorganisasi, berbagi pandangan mengenai situasi dan kondisi sosial dan politik, berperan aktif dalam kegiatan aksi, ikut menyuarakan suara dengan masuk partai politik, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pendidikan politik.

2.3 Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih menjadi salah satu hal yang menarik untuk diteliti karena perilaku pemilih menjadi salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi kemenangan dalam pemilu legislatif. Menurut Schumpeter, (Syafhendry, 2016) perilaku pemilih saat ini selalu dikategorikan sebagai pemilih rasional dan tidak rasional, hal tersebut ditandai dengan tidak sedikitnya masyarakat mengkonsumsi informasi yang berasal dari sumber yang kredibel sehingga menimbulkan persepsi yang cenderung menggiring opini publik saja. Selain itu, menurut Brennan dan berpendapat bahwa pola perilaku pemilih akan sangat dipengaruhi oleh loyalitas serta ideologi yang mereka pegang. Oxford Advanced Learner's Dictionary berpendapat bahwa perilaku pemilih atau voting behavior merupakan suatu langkah yang diambil seseorang dalam menetapkan pilihannya baik itu calon, pendapat, atau partai politik baik itu dalam bentuk musyawarah maupun dalam bentuk pemilihan umum.

Dalam konsep pemahaman perilaku pemilih dikategorikan dalam dua mazhab yaitu mazhab Colombia serta mazhab Michigan. Pada kubu pertama

menekankan pada sosiologis sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pendekatan ini mempercayai bahwa masyarakat akan terstruktur secara norma dasar sosial yang berdasar pada pengelompokan sosiologis seperti jenis kelamin, umur, kelas sosial, agama yang dianggap memiliki peranan besar dalam membentuk perilaku memilih masyarakat. (Gaffar, 1999)

Kubu Michigan lebih menekankan pada psikologis sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Pola perilaku politik seseorang akan dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya baik itu secara tingkat kecerdasan, faktor biologis, atau faktor emosional. Sikap ini akan muncul Ketika adanya proses sosialisasi politik suatu partai yang kemudian memunculkan rasa simpatik terhadap partai politik yang bersangkutan.

(Cholisin, 2007) Perilaku pemilih diartikan sebagai suatu runtutan kegiatan yang dilakukan dalam mengambil keputusan yakni diantaranya memilih atau tidak memilih. Ada lima pendekatan dalam perilaku pemilih diantaranya adalah :

1. Pendekatan Sosiologis pemilih lebih condong menggunakan hak pilihnya berdasarkan konteks sosial. Pendekatan ini secara luas menjabarkan terkait *habbit* atau karakteristik sosial di masyarakat yang membentuk kelompok sosial yang berperan penting terhadap perilaku pemilih seseorang. Artinya, seseorang ketika memilih dapat dipengaruhi oleh latar belakang demografi, sosial ekonomi, agama, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, serta jenis pekerjaan. Dapat digaris bawahi bahwa variabel pendidikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Hal tersebut dikatakan

bahwa pendidikan seseorang sangatlah erat kaitannya dengan sistem sosial di masyarakat yang kemudian dapat membentuk suatu kelompok sosial yang kuat. Dengan latar belakang pendidikan tertentu akan memiliki perspektif tersendiri dalam menentukan keputusannya. Perspektif ini yang nantinya akan mempengaruhi sosial masyarakatnya. Variabel pendidikan terhadap perilaku pemilih juga menarik untuk dikaji lebih dalam, konsep dasar pendidikan untuk membangun karakter masyarakat menjadi sangat relevan terhadap bagaimana seseorang menganalisa fenomena sosial politik yang terjadi disekitarnya. Yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhinya dalam memilih. Hal ini sendiri dikarenakan seseorang tersebut akan memilih calon wakilnya atau pemimpinnya sesuai kriteria ideal pemimpin atau calonnya, dan tentunya berdasarkan tingkat pendidikan orang tersebut.

2. Pendekatan Ekologis menafsirkan bahwa sangat relevan apabila terhadap perbedaan karakteristik pemilih dilihat dari letak territorial, contohnya perbedaan wilayah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten.
3. Pendekatan Struktural ialah salah satu pendekatan perilaku pemilih dalam menentukan hak pilihnya berdasarkan pada struktur yang lebih luas, contohnya sistem partai, program yang diusung oleh partai, struktur sosial, hingga sistem pemilihan umum yang ada.
4. Pendekatan Psikologi Sosial menempatkan pemilih pemilu berdasarkan psikologi sosial. Pendekatan ini menafsirkan sikap seseorang atau individu adalah sebuah refleksi diri seseorang yang menjadikan hal tersebut sebuah

variabel yang berpengaruh terhadap pola perilaku politik seseorang, hal tersebut dikarenakan pendekatan ini menggunakan tiga aspek penekanan sebagai kajian utama, dimana para pemilih memiliki ketertarikan atau keterikatan yang kuat dengan partai tertentu dengan memiliki rasa emosional yang kuat.

5. Pendekatan Pilihan Rasional melihat peluang pemilihan sebagai pertimbangan untung maupun rugi. Pertimbangan ini dapat dilihat dari kemungkinan terbesar yang diperoleh jika dibandingkan dengan kemungkinan yang lain. Pendekatan ini tidak hanya sebagai pertimbangan pemilih saja melainkan para calon juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk kemungkinan terpilih pada pemilu yang akan datang. Bagi pemegang hak suara dalam pemilu, pendekatan ini digunakan dalam mengambil keputusan antara ikut memilih atau tidak.

Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih seseorang menurut

Meliala diantaranya:

1. Program kerja ataupun kebijakan public yang direncanakan. Dimana aspek ini menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang apakah calon kandidatnya akan memfokuskan kebijakan publik pada sektor apa saja.
2. Citra Sosial (*Social Imagery*) pada bagian ini, citra atau pandangan kandidat ataupun partai politik menjadi hal yang patut disoroti. Dengan membangun citra yang baik sebelumnya maka para pemilih juga akan memiliki persepsi baik terhadap calonnya.

3. Perasaan Emosional, kedekatan emosional yang terbangun antara individu masyarakat dengan calon kandidat dan partai politiknya akan semakin melegitimasi penggunaan hak pilihnya pada calon kandidat yang secara emosional sangat dekat. Terbukti dengan langkah supportif yang diberikan terhadap segala bentuk keputusan dan langkah politik yang diambil calon kandidatnya.
4. Peristiwa Personal, yakni karakteristik dan kehidupan pribadi calon kandidat akan sangat berpengaruh terhadap persepsi politik masyarakat terhadap dirinya. Dengan karakter dan kepribadian yang baik maka rasa simpatik masyarakat akan muncul.
5. Peristiwa Mutakhir, adalah kejadian atau hal-hal yang dilakukan calon kandidat selama masa kampanye hingga proses pemilihan dilihat dengan konsistensi serta kegiatan apa saja yang dilakukan selama kampanye.

Menurut Aminah (Fauzi, 2019) Situasi perilaku pemilih di tengah-tengah masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh fenomena politik yang terjadi dilingkungan sekitar. Sistem perpolitikan serta keadaan sosial dan budaya yang beragam menjadi instrumen penting dalam pertumbuhan demokrasi di negara itu sendiri. Kemudian Surbakti (Kaesmetan, 2014) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan penggunaan hak suara yang dilakukan individu yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan. Dalam hal pengambilan keputusan disini adalah memilih atau tidak memilih.

Menurut (Sitepu, 2012) perilaku politik dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat proses perumusan atau pelaksanaan

kebijakan politik yang mana aktor pelaksana kegiatan tersebut meliputi pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perilaku politik dibagi menjadi dua bagian: pertama, perilaku politik meliputi institusi dan pejabat pemerintah, yang kedua perilaku politik masyarakat pada umumnya, baik itu secara individu maupun kelompok. (Surbakti, 2010) mengartikan perilaku pemilih sebagai suatu kegiatan penggunaan hak suara yang dilakukan seseorang atau individu yang memiliki keterkaitan dengan proses pengambilan keputusan baik itu melakukan pilihan atau tidak memilih pada aktivitas pemilihan umum.

Secara konteks, perilaku pemilih akan mempengaruhi pilihan pada calon maupun partai politik yang nantinya akan menentukan siapa saja wakil rakyat yang akan mengemban tanggung jawab dalam menduduki kursi pemimpin pemerintahan maupun legislatif baik itu dalam tingkat daerah maupun tingkat nasional. Perilaku pemilih secara nyata akan berpengaruh terhadap pemilihan umum, dimana seseorang akan menentukan pilihan dan hak pilihnya terhadap calon legislatif, partai politik, kepala daerah, hingga calon presiden sekalipun.

Pada proses pemilu, individu sebagai pemilih kemudian terbagi menjadi dua, yaitu pemilih emosional serta pemilih rasional. Pemilih emosional cenderung lebih mengedepankan hubungan yang kuat dengan calon kandidat dengan tingkat loyalitas relative lebih kuat. Mereka akan mendukung dan sangat vocal tetapi tidak dengan pondasi yang kuat. Mereka lebih menutup mata terhadap realitas kandidat, sehingga rela dijadikan apapun sekalipun menjadi korban atas kesuksesan calonnya.

Disamping itu, pemilih yang rasional adalah pemilih yang akan menganalisis dan mengkalkulasikan terlebih dahulu terkait kelayakan calon kandidatnya didasari dengan sumber maupun data yang kuat. Mereka hanya akan memilih kandidat tersebut jika kandidat tersebut akan memperjuangkan tujuan serta aspirasinya dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Hal tersebut tentunya didasari oleh latar belakang kandidat, *track record*, tidak hanya berdasarkan pada aspek mitologis semata.

2.4 Penelitian Terdahulu

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian yang telah dibuat terlebih dahulu sebagai bentuk perbandingan serta kajian. Penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tersebut tidak terlepas dari pembahasan penelitian itu sendiri yakni mengenai teori tingkat pendidikan dan perilaku pemilih, dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mohamad Rizki Fauzi (2017), Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Pada Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengaruh yang timbul dari tingkat pendidikan seseorang terhadap partisipasi politik di Kabupaten Tasikmalaya. Disertai teori yang mendukung	Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang dibahas yakni mengenai pengaruh tingkat pendidikan di suatu daerah.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang membahas mengenai perilaku politik sera lokasi penelitian yang berbeda.

Judul Penelitian	Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Innarotul Fu'adah (2019), Perilaku Politik Pemilih Pemula Siswa SMAN 5 Tasikmalaya Pada Pilkada Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya	Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi pada pemilih pemula siswa SMAN 5 Tasikmalaya. Peneliti ini menganalisis bagaimana pola perilaku politik yang terjadi pada pemilih pemula dalam menghadapi pemilu. Salah satunya adalah fokus mengenai perilaku pemilih dan partisipasi politik	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perilaku politik	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dari lokasi dan teori yang digunakan yakni teori perilaku politik dan pemilih pemula.
Moch, Rico Effendi (2019), Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pemula di Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015	Penelitian ini mengkaji bagaimana latar belakang pendidikan mahasiswa S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya mempengaruhi perilaku memilih mereka.	Persamaan dalam penelitian ini menyangkut pengaruh pendidikan terhadap perilaku politik.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan serta objek responden yang dipilih yakni masyarakat desa Baregbeg dengan mahasiswa S1 UIN Sunan Ampel Surabaya.
Imelda (2019) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2018.	Penelitian ini membahas mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku pemilih pada pilkada di Kota Tasikmalaya.	Persamaan pada penelitian ini adalah membahas dan menguji pola perilaku pemilih berdasarkan tingkat pendidikan seseorang.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya.

2.5 Definisi Operasional

Secara garis besar, definisi operasional merupakan penjabaran secara operasional terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam definisi operasional menjelaskan mengenai beberapa istilah yang ada dalam penelitian tersebut. Makna tersebut juga disampaikan oleh Nazir (1999:152) bahwa definisi operasional diartikan sebagai makna yang disematkan pada suatu variable dengan menjelaskan beberapa arti atau istilah secara spesifik, atau juga dengan memberikan operasional baru yang digunakan untuk mengukur variabel tertentu. Mengacu pada pernyataan diatas, berikut adalah definisi operasional yang ada dalam penelitian ini :

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel tingkat pendidikan

Variabel tingkat pendidikan ini adalah tingkat pendidikan formal terakhir masyarakat yang memiliki hak pilih. Menggunakan skala likert dengan menggunakan kuisisioner sebagai alat ukur dan angket sebagai cara ukur.

2) Variabel perilaku pemilih

Variabel perilaku pemilih ini adalah pola perilaku masyarakat dalam memilih. Menggunakan skala likert, kuisisioner sebagai alat ukur dan angket sebagai cara ukur.

Tabel 2.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen	Skala
Tingkat Pendidikan	Tahapan pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan oleh lembaga terkait berdasarkan kepada tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kesulitan bahan pengajar dan cara penyajian bahan pengajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan 2. Pendidikan formal atau informal 3. Motivasi Individu 4. Kondisi Sosial 5. Akses 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat pendidikan terakhir 2) Pernah mengikuti pendidikan formal dan informal 3) Motivasi mendapatkan pendidikan 4) Kondisi sosial keluarga dan lingkungan 5) Akses mendapatkan pendidikan 6) Rasa ingin tahu lebih terhadap sesuatu 	Likert
Perilaku Pemilih	Tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling tepat dalam menentukannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran hak pilih 2. Pendekatan sosiologis 3. Pendekatan Ekologis 4. Pendekatan Struktural 5. Pendekatan Psikologi Sosial 6. Pendekatan Rasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan hak pilih dengan baik dan benar 2) Hak mendapatkan kebebasan dalam memilih 3) Sosial dan Budaya 4) Agama 5) Tingkat pendidikan 6) Letak geografis calon 7) Struktur sosial 8) Struktur partai 	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen	Skala
			9) Citra Personal 10) Citra Partai Politik di Masyarakat 11) Kedekatan Emosional 12) Program Kerja 13) Visi-misi 14) Pengambilan Keputusan	

2.6 Hipotesis

Berdasar pada kerangka pemikiran, maka dirancang sebuah hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian ini yakni “Tingkat pendidikan Berpengaruh Terhadap Perilaku Pemilih” jika semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka akan semakin selektif pula seseorang atau individu dalam menentukan pilihannya. Dan sebaliknya jika semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin apatis atau tidak peduli terhadap pilihannya.